

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penurunan populasi penduduk di Jepang menjadi perhatian utama seiring berjalannya waktu, menciptakan tantangan serius bagi negara tersebut. Data terkini tentang tren populasi Jepang menunjukkan bahwa jumlah kematian pada tahun 2022, sekitar 1,56 juta orang, hampir dua kali lipat dari jumlah kelahiran yang hanya mencapai 771.000 individu. Berdasarkan hasil sensus tahun lalu yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri di Tokyo, perkiraan total populasi yang hilang sekitar 800.000 jiwa. Angka ini mencerminkan penurunan populasi terbesar sejak pertama kali dicatat pada tahun 1968.

Beberapa faktor yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap tren ini termasuk perubahan dalam norma-norma sosial, ekonomi, dan demografi. Angka kelahiran yang rendah telah menjadi masalah mendasar, dengan banyak pasangan muda yang menunda atau bahkan memutuskan untuk tidak memiliki anak. Ini disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk beban ekonomi yang tinggi, tekanan pekerjaan yang intens, dan dorongan untuk memprioritaskan pencapaian karier pribadi.

Selain itu, pergeseran peran gender di masyarakat Jepang telah memainkan peran penting. Wanita semakin mencari kesetaraan dalam karier dan kehidupan pribadi mereka, yang dapat menghasilkan penundaan dalam perencanaan keluarga atau bahkan pengurangan jumlah anak yang diinginkan. Faktor-faktor ini, bersama

dengan urbanisasi yang terus berlanjut dan perubahan gaya hidup modern, menciptakan dinamika sosial yang berbeda yang dapat mempengaruhi keputusan keluarga terkait dengan ukuran keluarga. Stratifikasi gender mendorong timbulnya gerakan sosial di kalangan perempuan, dikenal sebagai feminisme, yang bertujuan memperjuangkan dan memperluas hak-hak perempuan. Berawal di Prancis pada abad ke-18, gerakan ini menyebar ke berbagai belahan dunia. Terutama di ranah politik, fokus feminisme adalah pada perjuangan mencapai persamaan hak pilih antara perempuan dan laki-laki, yang telah menghasilkan pemberian hak pilih seragam di berbagai negara (Adriani, 2014).

Menurut Kustianty (dalam Rahman, 2012), gagasan tentang *haji* sangat terkait dengan kehidupan masyarakat, kelompok, dan interaksi antarindividu. *Haji* muncul ketika ada ketidaklaziman atau penyimpangan dalam hubungan tersebut (1994: 4). Dengan kata lain, jika terjadi di antara individu satu dengan individu lainnya, hal itu dianggap sebagai suatu bentuk budaya yang cenderung mengikuti norma sosial, dengan tujuan menghindari pandangan dan kritik dari pihak lain. Oleh karena itu, perilaku tersebut lebih bersifat mengikuti orang lain daripada didasarkan pada keyakinan pribadi.

Pada masa feodal di Jepang, kelas samurai dihadapkan pada standar etika yang ketat dan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap diri mereka sendiri serta masyarakat. Warisan nilai-nilai dan harapan tersebut tetap memainkan peran signifikan dalam membentuk budaya kerja dan norma sosial Jepang hingga saat ini. *Samurai* pada masa tersebut memiliki harga diri yang tinggi. Kalah dalam perang merupakan aib sekaligus pencemaran harga diri bagi para samurai. *Samurai* yang

kalah bertarung biasanya akan melakukan *harakiri*. *Harakiri*, juga dikenal sebagai *seppuku*, merujuk pada praktik tradisional Jepang dimana seorang individu melakukan bunuh diri dengan cara menyembelih diri sendiri, umumnya menggunakan pedang *katana*.

Pada periode ini, kelas samurai menerapkan praktik ini sebagai bentuk ritual pribadi untuk mempertahankan harga diri, kehormatan, dan pengabdian kepada atasan atau pemimpin. Praktik ini, selain sebagai bentuk bunuh diri, berkembang menjadi ekspresi budaya yang mencerminkan nilai-nilai keberanian, kesetiaan, dan kehormatan samurai. Bangsa Jepang juga merupakan bangsa yang sulit untuk menerima kekalahan, tidak ada kata menyerah bagi bangsa Jepang. Kekalahan bukan berarti mati, mereka berusaha bangkit kembali dan mencari kemenangan di bidang lain. Mereka tidak menerima kekalahan yang dapat merendahkan harga diri. Masyarakat Jepang tidak dapat menanggung malu jika mengalami kegagalan, mereka lebih memilih mati daripada harus menanggung malu bila mengalami kegagalan (Chaer, 2017)

Harakiri, atau *seppuku*, dan budaya malu di Jepang saling terkait karena keduanya mencerminkan nilai-nilai etika, kehormatan, dan tanggung jawab terhadap kelompok sosial. *Harakiri*, yang dilakukan oleh para *samurai* pada masa lalu, adalah bentuk ekstrem untuk membersihkan kehormatan yang tercemar, menghindari malu, dan melibatkan pengorbanan diri. Budaya malu, yang lebih luas dan umum, mencakup norma-norma sosial yang kuat terkait dengan kesopanan, tanggung jawab kelompok, dan rasa hormat terhadap orang lain. Keduanya mencerminkan pentingnya kehormatan dan rasa malu dalam masyarakat Jepang,

dengan budaya malu memberikan tekanan terhadap individu untuk memperbaiki citra diri setelah melanggar norma-norma sosial. Meskipun *harakiri* sudah tidak umum dilakukan, warisan nilai-nilai ini masih memengaruhi cara berpikir dan bertindak di dalam masyarakat Jepang modern.

Budaya malu pada era modern dapat dirasakan oleh masyarakat modern di Jepang. Bagi orang Jepang yang mengutamakan peran & status sosial dalam masyarakat akan mementingkan pendidikan serta pekerjaan untuk bisa dipandang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya malu di Jepang memainkan peran penting dalam menanggapi individu yang tidak bekerja, terutama karena norma sosial dan ekonomi yang menekankan kesetiaan terhadap perusahaan dan harapan untuk sukses karier. Masyarakat Jepang cenderung menilai nilai seseorang berdasarkan prestasi dan kontribusi kerjanya, sehingga individu yang tidak bekerja dapat merasa tertekan dan mengalami stigmatisasi. Labeling terhadap mereka menciptakan rasa malu dan kecemasan, memperkuat stigma terhadap pengangguran, dan dapat memengaruhi kesehatan mental mereka, menyulitkan mereka untuk mencari dukungan atau bantuan.

Etos kerja di Jepang mencerminkan nilai-nilai yang mendalam terkait dengan dedikasi, disiplin, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Budaya kerja Jepang sering kali ditandai oleh jam kerja yang panjang, dimana pekerja sering diharapkan untuk menunjukkan komitmen dan kesetiaan penuh terhadap perusahaan. Selain itu, ada tekanan sosial yang kuat untuk mencapai kesuksesan dalam karier, dan individu cenderung menempatkan kepentingan kelompok atau perusahaan di atas kepentingan pribadi. Tekanan sosial di Jepang menciptakan norma-norma tinggi

dan ekspektasi yang kuat terhadap individu. Budaya kerja yang intens dan harapan untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek hidup dapat menimbulkan tekanan yang signifikan. Etos kerja yang kuat dapat mengakibatkan stres, kelelahan, dan dalam beberapa kasus *karoshi*.

Menurut peneliti, dalam budaya malu Jepang, mengecewakan atau gagal dalam memenuhi ekspektasi masyarakat dapat menimbulkan perasaan malu dan stigmatisasi. Loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan dan kepatuhan terhadap norma-norma kerja yang keras seringkali membuat individu enggan untuk mengakui kelelahan atau mengambil cuti, karena hal tersebut bisa dianggap sebagai tanda ketidakmampuan atau kegagalan yang dapat menimbulkan rasa malu. Dengan adanya stigma negatif ini, mengakibatkan banyak penduduk di Jepang lebih memilih pekerjaan daripada hubungan asmara. Etos kerja di Jepang, ditandai oleh jam kerja panjang dan tekad tinggi terhadap karier, dapat berpengaruh pada keputusan seseorang untuk tidak menikah. Tekanan untuk sukses dalam dunia kerja dan norma sosial yang menetapkan peran gender dapat membuat individu kesulitan menemukan waktu untuk hubungan dan keluarga. Menurut penelitian Mulyadi (2018), semangat kerja yang tinggi di kalangan masyarakat Jepang telah mengurangi minat mereka terhadap pernikahan dan pembentukan keluarga di waktu mendatang. Terutama, pandangan perempuan modern di Jepang saat ini cenderung lebih memprioritaskan pendidikan dan karir mereka daripada keinginan untuk membentuk keluarga. Faktor ekonomi, termasuk biaya hidup dan perumahan, juga dapat memainkan peran dalam keputusan ini. Kurangnya dukungan untuk pekerja orang tua dan perubahan nilai-nilai generasi muda yang mungkin lebih fokus pada

kebebasan pribadi dan pengembangan karier juga dapat memengaruhi keputusan ini. Meskipun etos kerja yang kuat mendorong pencapaian dalam karier, terdapat adanya *trade-off* dengan keputusan untuk tidak menikah guna menghindari tekanan dan tanggung jawab yang dianggap menghambat perkembangan profesional.

Dilihat dari permasalahan yang terjadi, peneliti beranggapan penurunan populasi penduduk di Jepang dipengaruhi budaya malu (*haji no bunka*). Dengan demikian, penurunan populasi di Jepang bukanlah masalah yang dapat diatasi dengan satu kebijakan atau tindakan tunggal. Diperlukan pendekatan holistik yang memadukan upaya-upaya kebijakan, perubahan budaya, dan perubahan sosial. Peningkatan kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil juga diperlukan untuk mencapai solusi yang berkelanjutan terhadap tantangan demografis ini, yang memainkan peran kunci dalam membentuk masa depan Jepang.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah pengaruh *haji no bunka* terhadap penurunan populasi penduduk di Jepang. Subfokus penelitian ini adalah hubungan *haji no bunka* dengan variabel yang mempengaruhi penurunan populasi di Jepang seperti harga diri dan etos kerja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijelaskan, perumusan masalah pada penulisan skripsi ini adalah “Bagaimana pengaruh *haji no bunka* terhadap penurunan populasi penduduk di Jepang?”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Dari segi manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berharga pada studi demografi dan budaya di Jepang. Dari segi manfaat praktis, hasil penelitian dapat memberikan masukan penting untuk perumusan kebijakan penduduk di Jepang, membantu pemerintah dalam menghadapi tantangan penurunan populasi.

